

OMBUDSMAN SEBUT KANTOR PEMERINTAHAN SUMBAR BELUM RAMAH DISABILITAS

Jum'at, 02 Agustus 2019 - Meilisa Fitri Harahap

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kantor pemerintahan di Sumatera Barat hingga tahun 2019 baru sebanyak 26 persen yang ramah disabilitas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Ombudsman Sumatera Barat, Yefri Hariani, Kamis 1 Agustus 2019 di Kantor Ombudsman Sumbar.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menangani dua laporan terkait diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

"Kami menangani dua laporan, yang pertama adalah kasus yang di Masjid Raya Sumatera Barat," katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penanganan terkait laporan tersebut dan permasalahan Dokter Romi.

"Keduanya masih kami tangani, kami harap ke depan kantor pemerintahan di Sumatera Barat bisa lebih ramah disabilitas, setidaknya angka 26 persen itu bisa meningkat," lanjutnya.

Ia mengatakan jika Sumbar memiliki Perda Disabilitas, angka 26 persen yang dicap oleh Ombudsman tersebut menyatakan Pemerintahan di Ranah Minang masih belum ramah disabilitas.

"Jika Sumbar memiliki Perdanya, angka 26 persen itu tentunya menyatakan bahwa Sumbar belum ramah disabilitas," tutupnya.

[Halbert Caniago]